Volume I



# Konferensi Nasional Sosiologi V

Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia Padang, 18–19 Mei 2016



# GERAKAN SOSIAL DAN KEBANGKITAN BANGSA

Tim Editor:

Jendrius, Emy Susanti, Ida Ruwaida, Bagus Haryono, Herlan, Azwar





Kerjasama : APSSI dan Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Andalas



### **VOLUME I**

# Prosiding KONFERENSI NASIONAL SOSIOLOGI V

Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia Padang 18 – 19 MEI 2016

## GERAKAN SOSIAL DAN KEBANGKITAN BANGSA

#### **Tim Editor:**

Jendrius (Universitas Andalas) Emy Susanti (Universitas Airlangga) Ida Ruwaida (Universitas Indonesia) Bagus Haryono (Universitas Sebelas Maret) Herlan (Universitas Tanjung Pura) Azwar (Universitas Andalas)

#### e-ISBN:

ISBN: 978-602-99467-03 978-602-99467-1-0 (jil. 1)

### Kerjasama:

APSSI dan Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Andalas

#### **Diterbitkan Oleh:**

Laboratorium Sosiologi, FISIP Universitas Andalas 2016

#### KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah Subhanahuwataala, berkat limpahan karunia dan rahmat-Nya penyusunan prosiding Konferensi Nasional Sosiologi V ini berhasil diselesaikan. Konferensi yang mengambil tema *Gerakan Sosial dan Kebangkitan Bangsa* dan berlangsung dari tgl 18 – 19 Mei 2016 ini, melingkupi sub-tema yang cukup luas dan beragam. Karena itu penyusunan prosiding ini juga disesuaikan dengan sub-tema yang ada dalam konferensi tersebut.

Prosiding ini terdiri dari dua Volume. Volume I terdiri dari 7 BAB yakni (BAB I –BAB VII), mencakup beberapa sub-tema, yakni sub-tema gerakan perempuan, gerakan agraria, gerakan buruh, gerakan lingkungan, gerakan petani, gerakan kelompok marginal dan gerakan politik. Sementaraitu, Volume II terdiri dari 10 BAB (BAB VIII – BAB XVII) yang mencakup sub-tema yang lebih beragam yakni gerakan keagamaan, pendidikan transformatif, gerakan pemuda, keluarga, komunitas, gaya hidup, gender dan sub-tema lainnya.

Atas selesainya penyusunan prosiding ini, terima kasih tak terhingga diucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung mulai dari pelaksanaan konferensi sampai penyusunan prosiding ini. Kepada pengurus pusat Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia (APSSI), Rektor Universitas Andalas, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, Ketua Yayasan dan Direktur STKIP PGRI Sumatera Barat, para editor, panitia pelaksana serta semua pihak yang telah ikut bertungkuslumus dalam membantu pelaksaan Konferensi Nasional Sosiologi V dan penyusunan prosiding ini yang namanya tidak mungkin disebutkan satu-persatu, diucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Padang, 18 Mei 2016

Tim Editor

## **DAFTAR ISI**

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
VOLUME I	
I. GERAKAN PEREMPUAN	
1. Wahidah Rumondang Bulan	1
Fenomena Cerai Gugat = Indikasi Kebangkitan Perempuan?	1
2. Kustini	31
2. Kusum Perempuan Menggugat: Fenomena Perceraian Masyarakat Muslim	31
Di Indonesia	
3. Yunindyawati	39
Resistensi dan Praktik Kuasa Pengetahuan Perempuan Petani Padi	3)
Sawah Lebak dalam Pemenuhan Pangan Keluarga	
4. Ida Ruwaida	58
Kemiskinan dan Aksi Kolektif Perempuan	30
5. Novita Saseria	71
Gerakan Sosial Dukung Ibu Menyusui Di Sumatera Barat	/1
6. Tri Rini Widyastuti, Riris Ardhanariswari	99
Menolak untuk Menyerah: Upaya Perempuan Perajin Batik Tulis untuk	77
Tetap Menjaga Tradisi Batik Tulis di Kab. Banjarnegara	
7. Sulsalman Moita, I Ketut Suardika	113
Relasi Struktur dan Aktor dalam Arena Kontestasi Politik Perempuan	113
8. Vina Salviana Darvina S, Hutri Agustiono	126
Pendidikan Politik dan Pengembangan Ekonomi Lokal Perempuan Desa	140
9. Syafruddin	137
7. Syan udum Tradisi Perceraian: Ketidakadilan Gender dan Perlawanan Perempuan	137
Di Suku Sasak Lombok	
10. Soetji Lestari, Suksmadi Sutoyo, JarotSantoso, Tri Sugiarto, Joko	152
Santoso, Nalfaridas Baharuddin, Rin Rostikawati Beras dan Gerakan Solidaritas Perempuan dalam Tradisi Nyumbang	154
Di Tengan Monetisasi Perdesaan.	
Č	167
11. Rizki Takriyanti	107
Gerakan Sosial untuk mewujudkan perilaku wanita Pro Lingkungan	195
<b>12. Shirley Goni</b> Kepemimpinan Perempuan pada Penyelenggaraan Pemerintahan	195
di Provinsi Sulawesi Utara 13. Selinaswati	202
	202
Mobilisasi Sumber Daya dan Identitas Kelompok dalam Menolak	
Ranperda Diskriminatif: StudiKasus Gerakan FKWIS Sumatera Barat tahun 2001	
Sumaiera Barai ianun 2001 14. Indraddin	215
Gerakan Masyarakat Lokal Mengelola Remitance untuk Pengentasan	413
Jerukan masyarakai Lokai mengelola Kemilance anlak Fengenlasan	

Kemiskinan	
15. Suwaib Amiruddin, Titi Stiawati	231
Solidaritas Sosial Komunitas Nelayan antar Etnik di Kabupaten	
Pandeglang, Provinsi Banten	
II. GERAKAN AGRARIA	
1. Alfitri, Firman Muntaqo, Ranjasa Putra, Rogaiyah, Abdul Kholek	254
Penyelesaian Konflik Pertanahan Melalui Pendekatan Mediasi:	
Kasus Petani Desa Rengan dan Limbang Jaya dengan PTP VII	
di Ogan Ilir	
2. Ferdinal Asnim	266
Reforma Agraria Bidang Kehutanan: Sebuah Tinjauan Politik Simbolik	
3. Herlan	280
Kerawanan Konflik Sosial Pembanginan Perkebunan Kelapa Sawit	
di Kalimantan Barat	
4. Siti Aminah	<b>29</b> 2
Ekologi dalam Pergulatan Tanah Ulayat Masyarakat Adat	
5. Amruddin	303
Petani Kecil di Tengah Agribisnis Kapitalis	
6. Sityi Maesarotul Qori'ah	313
Strategi Penghidupan Warga Dusun Bonto di Kawasan Hutan Pinus	
di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan	
7. Iskandar Dzulkarnain	329
Heterotopia Perang Kepemilikan Tanah Bagi Masyarakat Madura:	
Studi Terhadap Gerakan Sosial Dekonstruksi Makna Tanasangkol	
8.Caritas Woro Murdiati Runggandini	336
Renegosisasi Masyarakat Adat di Tengah Arus Pergeseran Paradigma	
dalam Pengelolaan Hutan.	
9. Edi Indrizal, Muhammad Ansor	356
Ketundukan dalam Perlawanan: Kemasan Modernitas dan Narasi	
Perlawanan Orang Akit di Riau	
III. GERAKAN BURUH	
1. Rio Tutri	372
Ierat Bagi Kaum Buruh: Imajinasi Sosiologi dalam	
Melihat Gerakan Buruh	
2. Anggreni Primawati	388
Gerakan Sosial terhadap Perlindungan Sosial Buruh Migran Indonesia	
Di Malaysia	
3. Sigit Rochadi	400
Pergerakan Pekerja Muslim: Studi terhadap Sarbumusi	
dan Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia	
4. Yoyok Hendarso	418
Negosiasi Buruh Migran Indonesia di Perkebunan Sawit Serawak,	
Malaysia	
5. Yogaprasta Adi Nugraha	448

Melawan Tembok Besi Tuan tanah: Sebuah Realitas Ketidakberdayaan	
Buruh Tani Melawan Hegemoni Alat Panen di Sulawesi Selatan	
6. Ikhsan Muharma Putra	461
Gerakan Kelompok Miskin dan Marginal pada Konteks Pengurangan	
Resiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim	
7. Indhar Wahyu Wira Harjo, Yogi Eka Chalid Farobi	477
Konstelasi Media Massa Lokal dalam Gerakan Penolakan	
Pembangunan Hotel Rayja	
IV. GERAKAN LINGKUNGAN	
1. Damsar, Indrayani	<b>490</b>
Pasar Loak: Gerakan Lingkungan Global	
2. Victoria Sundari Handoko	<b>500</b>
Komodifikai Desa Wisata: Gerakan Masyarakat dalam Pengelolaan	
Desa Wisata di Bejiharjo, Gunung Kidul	
3. Siti Zunariyah, Akhmad Ramdon	512
Gerakan Sosial Warga untuk Mendorong Tata Kelola Sungai yang	
Berwawasan Lingkungan	
4. Rachmad K. Dwi Susilo	528
Modal Sosial, Jejaring Sosial dan Identitas Kolektif dalam Gerakan	
Sosial untuk Konservasi Sumber Air	
5. Irsadi Aristora	<b>538</b>
Melawan Asap Sebagai Hak Dasar Manusia	
6. Tri Agus Susanto, Vieronica Varbi Sunundiati, Diana Dewi Sartika	555
Gerakan Masyarakat Pasang Surut Melestarikan Sungai: Analisis	
Struktur, Kesempatan Politik, mobilisasi dan Perubahan Sosial	
7. Bintarsih Sekarningrum, Yusar	<b>568</b>
Perilaku Komunitas dalam Gerakan Pungut Sampah (GPS)	
di Kota Bandung	
8. Lina Marina Rohman	577
Gerakan Rakyat Melawan Proses Pembangunan Waduk Jatigede di	
Kabupaten Sumedang, Jawa Barat	
9. Lutfi Amiruddin	<b>600</b>
Gerakan Penolakan Pembangunan Hotel di Sekitar Sumber Mata Air	
10. Rusfadia Saktiyanti Jahya	611
Gerakan Lingkungan Penyadaran UKM Untuk Pembangunan	
Berkelanjutan	
11. Sulistyaningsih	<b>621</b>
Peran NGO Arupa dalam Sertifikasi Hutan Rakyat di Desa Giri Sekar,	
Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul.	
12. Bernardus Wibowo Suliantoro	638
Model Penyelesaian Konflik Sumber Daya Alam Hutan Berperspektif	
Gender Berbasis Kearifan Lokal.	
13. Royke R. Siahainenia	646
Ruang Publik Virtual sebagai saluran Perlawanan terhadap Kapitalisme	
Pertambangan	

<b>14. Miswanto</b> Model Pengelolaan Sampah Secara Partisipatif pada Masyarakat	671
Kampung Bugis, Kota Tanjung Pinang	
15. Akhmad Ramdon, Kusumaningdyah, Siti Zunariyah	685
Kampungnesia: Media Transformasi Komunitas untuk Merawat Kembali	000
Kampung, Sungai dan Kota	
16. Vieronica Varbi Sununiati	699
Diet Kantong Plastik di Kota Palembang	
17. Yogi Suprayogi Sugandhi, Rini Susetyawati Soemarwoto, Mila	
Mardotillah	717
Gerakan Sosial Melalui Rumah Sehat dan Imunisasi BCG sebagai	
Langkah Menurunkan Kejadian TB di Padang	
18. Evelin J.R. Kawung	729
Kaji Tindak Konsep Pembagian Kerja Antara Aparat dengan Masyarakat	
dalam Program Berbasis Lingkungan ; Studi Kasus Kelurahan Malalayan Satu Timur Kota Manado	g
V. GERAKAN PETANI DAN NELAYAN	
1. Zaiyardam Zubir, Lindayanti, Fajri Rahman	<b>740</b>
Dari Mukjizat ke Kemiskinan Absolut: Perlawanan Petani Riau	
Masa Orde Baru dan Reformasi 1970 - 2010	
2. Iwan Nurhadi	<b>761</b>
Habitus Petani dan Gagalnya Gerakan Sosial di Arena Perebutan	
Ruang Hidup	
3. Suparman Abdullah	772
Diskontinyuitas Komunitas Nelayan: Kasus Lae-lae dan Kampung	
Nelayan, Kel. Untia, Makasar	
4. Desi Yunita, Wahju Gunawan	<b>788</b>
Perubahan Struktur Sosial dalam Masyarakat Petani Plasma Kelapa Saw	it.
5. Dhevy Setya Wibawa, Clara Rosa Pudjiyogyanti Ajisukmo, Herry	
Pramono	810
Transformasi Sosial Komunitas Miskin di Kota Jakarta.	
6. Hartoyo	827
Perubahan Struktur Peluang Politik dan Strategi Adaptasi Gerakan Petan	
7. Bob Alfiandi, Izar Ul-Haq	842
Gejala Involusi Gerakan Petani Organik: Kasus Pada Komunitas Petani	
Alam, Kabupaten Agam, Sumatera Barat	
8. Dewi Anggraini	860
Respon Pemerintah Lokal Terhadap Gerakan Perlawanan 300 KK Petani	
VI. KELOMPOK MINORITAS DAN MARGINAL	
1. Elizabeth Imma Indra Dewi Windajani, Victoria Sundari Handoko,	
Gregorius Widiartana	881
Gerakan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas Melalui	
Pembentukan Kebijakan di Kabupaten Klaten	

2. Cici Darmayanti	898
LGBT Identity Of Implimentation Islamic Shari'a In Aceh	
3. Victoria Sundari Handoko	919
Komodifikasi Desa Wisata: Gerakan Masyarakat Dalam Pengelolaan	
Desa Wisata Di Bejiharjo, Gunungkidul	
4. Rinaldi	930
Representasi Gerakan LGBT dalam Media Massa: Analisis Wacana Kritis terhadap Pemberitaan LGBT dalam Pemberitaan Media Online	1
5. Ilham Havifi	937
Konten LGBT Di Media Sosial Dan Persepsi Kelompok Usia Muda	
Dalam Berprilaku	
<b>6. R.A. Tachya Muhammad, M.Fadhil Nurdin, Budi Sutrisno</b> Gerakan Sosial LGBT di Indonesia: Sejarah dan Tahapannya	968
7. Fifin Triswanti, Bangun Sentosa D. Haryanto	982
Menguak Eksistensi Minoritas Hindu Di Antara Agama Mayoritas	
Dalam Bingkai Tindakan Sosial Max Weber	
8. Wahyu Pramono, Dwiyanti Hanandini	988
Perlawanan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Sebagai Upaya Mempertahankan	
Eksistensinya Dalam Sistem Ekonomi Kota	
9. Dhevy Setya Wibawa, Clara Rosa Pudjiyogyanti Ajisuksmo,	
Herry Pramono	1002
Transformasi Sosial Komunitas Miskin Kota Jakarta	
VII. GERAKAN POLITIK	
1. Wirdanengsih	1020
Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Dalam Rangka Partisipasi	
Politik Yang Cerdas	
2.Sutrisno	1030
Relasi Kuasa Organisasi Sipil dengan Polisi Pasca 2000	40=4
3. Virtous Setyaka	1052
Relevansi Gerakan Sosial untuk Memperkuat Daya Saing Indonesia	
Dalam Masyarakat ASEAN	1051
4. Al Rafni, Suryanef	1071
Relawan Demokrasi dan Pendidikan Politik Transformatif	1007
5. Robertus Robet	1086
Anti Intelektualisme dan Terbenamnya Gerakan Sosial	1002
6. Andri Rusta, Putri Gemala	1092
Akuntabilitas Masyarakat Kota Padang Terhadap Pemilu Legislatif 2014	1110
7. Asrinaldi Politik Kolugagan Bonghulu dalam Buaktik Domoknasi di Sumatona Banat	1119
Politik Kekuasaan Penghulu dalam Praktik Demokrasi di Sumatera Barat	

# BAB I GERAKAN PEREMPUAN

### PERAN NGO ARUPA DALAM SERTIFIKASI HUTAN RAKYAT DI DESA GIRISEKAR KECAMATAN PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL YOGYAKARTA

#### Sulistyaningsih<sup>82</sup>

Email: sulistyaningsih76@gmail.com

#### **Abstrak**

NGO ARUPA, merupakan salah satu aktor yang terlibat secara intens dalam sertifikasi Hutan rakyat di Kabupaten Gunungkidul. Keterlibatan NGO ARUPA dimulai sejak awal pembuatan dokumen Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari yang dilakukan oleh Lembaga Ekolabel Indonesia pada tahun 2003. NGO ARUPA terlibat dalam proses sertifikasi hutan rakyat di Desa Girsekar Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran NGO ARUPA dalam proses sertifikasi hutan rakyat di Desa Girisekar Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul? Tulisan ini menggunakan teori perubahan sosial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan interpretatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan pengumpulan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NGO ARUPA berperan dalam proses sertifikasi hutan rakyat melalui berbagai tahapan yaitu tahap penyusunan dokumen PHBML, inisiasi gagasan sertifikasi hutan rakyat, prakondisi menuju sertifikasi serta proses sertifikasi hutan rakyat di Desa Girisekar Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul. Adanya peran yang sudah dilakukan oleh NGO ini telah berkontribusi dalam meningkatkan tata kepemerintahan kehutanan (good forestry governance), tata kepemerintahan usaha (good corporate governance) serta keberlanjutan kehidupan masyarakat (sustainable livelihood ) di Desa Girisekar Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul.

Keywords: NGO ARUPA, peran, sertifikasi hutan rakyat

#### Abstarc

NGOs ARUPA, is one of the actors involved in community forest certification in Gunungkidul Regency. NGOs ARUPA involved since creation of sustainable Community-Based Forest Management document conducted by LEI in 2003. NGOs ARUPA involved in the process of forest certification Girisekar Village ,Subdistrict Panggang, Gunungkidul Regency. The purpose of this study was to determine how the role of NGOs ARUPA in the process of community forest certification in Girisekar Village, Panggang subdistrict, Gunungkidul Regency? This paper uses social change theory. This study uses qualitative research methods with interpretive approach. Data was collected through in-depth interviews and secondary data collection. The results showed that role of NGOs ARUPA in the process of forest certification through various stages: namely PHBML document preparation, initiation of the idea of forest certification, the precondition to certification and process of community forest certification in Girisekar Village, Panggang subdistrict, Gunungkidul Regency. The role of NGOs ARUPA that has contributed in improving forest governance (good forestry governance), business governance (Good Corporate Governance) as well as the sustainability of public life

\_

<sup>82</sup> Dosen Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Keywords: ARUPA NGO, role, forest certification

#### 1.PENDAHULUAN

Sertifikasi hutan di Indonesia menjadi faktor pendorong akan arti pentingnya pengelolaan hutan yang lestari. Kondisi ini juga didukung karena adanya keprihatinan dari berbagai pihak terkait dengan deforestasi yang ada, kebutuhan kayu yang meningkat serta adanya tuntutan ekspor kayu ramah lingkungan bagi pasar internasional (terutama pasar Eropa dan Amerika Utara ).

Luas Hutan di Indonesia 94.432.000 hektar (2,34%) dari seluruh luas hutan di dunia (4.033.060.000 hektar). Indonesia berada dalam peringkat ke-7 untuk luas hutan di dunia. Meskipun demikian, keberadaan hutan di Indonesia penting dalam percaturan hutan dunia. Hal ini disebabkan karena kekayaan keragaman hayati yang ada di dalamnya. Berikut distribusi luasan hutan dunia tahun 2010 menurut FAO (2011) <sup>83</sup>

Tabel 1. Total luas hutan di dunia

NO	NEGARA	Luas Hutan (x 1000	Persentase	
		hektar)		
1	Federasi Rusia	809.090	20,06	50,30
2	Brazil	519.522	12,88	
3	Kanada	310.134	7,69	
4	Amerika Serikat	304.022	7,54	
5	China	206.861	5,13	
6	Rep. Demoktartik	154.135	3,82	46,70
	Kongo			
7	Indonesia	94.432	2,34	
8	+ 200 negara lainnya	1.634.864	40,54	
Jumlah '	Total	4.033.060	100%	

Inisiatif sertifikasi hutan di Indonesia diprakarsai oleh Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dengan membentuk tim ahli untuk membuat seperangkat alat untuk Pengelolaan Hutan Lestari pada tahun awal 1993. Pada akhir tahun 1993, atas prakarsa Menteri kehutanan dibentuk kelompok kerja Lembaga Ekolabel Indonesia (Pokja LEI)<sup>84</sup> untuk membahas dan memantapkan kriteria dan indikator PHL, metodologi penilaian dan sistem sertifikasi PHL. Pokja LEI berkembang menjadi LEI pada tanggal 6 Februari 1998. LEI telah mengembangkan sistem sertifikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari (PHBML), Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari (PHTL) dan sistem sertifikasi Lacak balak. Introduksi gagasan sertifikasi di Indonesia dilakukan melalui beberapa pendekatan sebagai berikut: pendekatan LSM-Donor, pendekatan LSM sektor swasta, pendekatan LSM pemerintah daerah dan pendekatan sektor swasta<sup>85</sup>.

LEI (Lembaga Ekolabel Indonesia) bersama para pihak terkait mengembangkan

<sup>84</sup> Pokja LEI terdiri dari pemerintah, akademisi, LSM dan swasta.

<sup>83</sup> FAO 2011 dalam Ahmad Maryudi (2015, 9)

<sup>85</sup> Alexander Hinrichs dkk. Sertifikasi Hutan Rakyat di Indonesia, (Deutsch Geselschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH 2008) hlm 47

sistem sertifikasi hutan yang merujuk pada prinsip-prinsip kelestarian hutan<sup>86</sup>. Sertifikasi hutan menurut Bass<sup>87</sup> didefinisikan sebagai berikut:

"prosedur verifikasi yang ditetapkan dan menghasilkan sertifikat terkait dengan kualitas pengelolaan hutan dalam hubungannya dengan satu set kriteria dan indikator di mana penilaiannya dilakukan oleh pihak ketiga yang independen".

Sertifikasi hutan yang ada di Indonesia meliputi sertifikasi hutan negara dan sertifikasi hutan rakyat. Skema sertifikasi yang digunakan skema sertifikasi LEI88 dan skema FSC<sup>89</sup> serta ada skema sertifikasi bersama (joint certification program)<sup>90</sup> antara Lembaga Sertifikasi (LS)<sup>91</sup> yang diakreditasi LEI<sup>92</sup> (Lembaga Ekolabel Indonesia) dan Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh Forest Stewardship Council (FSC)<sup>93</sup>.

Jumlah hutan yang telah tersertifikasi di Indonesia menurut data LEI pada tahun 2012 dengan jenis sertifikasinya sebagai berikut<sup>94</sup>:

- 1. Hutan alam seluas 411,690 hektar yang berada di Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.
- 2. Hutan tanaman seluas 1,429,055 hektar yang tersebar di berbagai daerah seperti Sumatra Selatan, Riau, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatra Utara, Jambi dan Nusa Tenggara Barat.
- 3. Hutan rakyat seluas 1,873,428.57 hektar yang tersebar di 22 wilayah kelola hutan rakyat di daerah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur dan Nusa

Keberadaan Hutan rakyat di Indonesia didukung oleh Undang-Undang No 41 tahun 1999. UU tersebut menyebutkan hutan rakyat adalah hutan yang tumbuh di atas tanah

88 Skema sertifikasi LEI ini muncul sebagai bentuk resistensi terhadap skema sertifikasi FSC. Skema sertifikasi LEI berbeda dengan skema sertifikasi yang lain . Hal ini disebabkan karena: (1) skema sertifikasi LEI didesain khusus untuk konteks pengelolaan hutan di Indonesia. (2) Skema sertifikasi LEI memiliki fokus, komitmen, dan keberpihakan kepada masyarakat petani hutan/adat. (3) Segala prosesnya melibatkan pendekatan multistakeholder yang didukung oleh NGO/LSM, masyarakat adat, pengusaha hutan, dan pemerintah. (4) LEI mengembangkan 3 sistem sertifikasi bagi 3 tipe pengelolaan hutan yang ada di Indonesia, yaitu hutan alam produksi, hutan tanaman, dan hutan berbasis masyarakat. (5) Adanya fasilitasi forum komunikasi di daerah untuk menjamin proses sertifikasi di lapangan transparan, media resolusi konflik, dan media menyusun perwakilan daerah dalam pengambilan keputusan sertifikasi . (www.lei.or.id)

620

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup> Info LEI, Pilot project Sistem Sertifikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari dan Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari (Bogor, LEI, 2002) hlm 3

<sup>87</sup> ibid, hlm 3-4

<sup>89</sup> Sertifikasi Skema FSC adalah skema sertifikasi yang memuat 10 kriteria pengelolaan hutan lestari. 10 kriteria tersebut mencakup isu tenuterial, hubungan komunitas, hak-hak pekerja, penilaian, dampak lingkungan, penyusunan rencana kerja dan konservasi hutan alam. Prinsip kelestraian FSC bersifat global dengan kriteria dan indikator operasional ditentukan di tingkat nasional/regional disesuaikan dengan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan yang lebih spesifik. (opcit) hlm 53-54 90 skema sertifikasi bersama (joint certification program) adalah skema sertifikasi bersama yang dilalukan oleh LEI dan FSC untuk kasus sertifikasi hutan di Indonesia.

<sup>91</sup> Lembaga Sertifikasi adalah lembaga yang bertujuan untuk melakukan penilaian terhadap unit manajemen dalam sistem sertifikasi yang berupa berupa kegiatan audit., pemeriksaan lapangan, konsultasi publik, dan seluruh proses sertifikasi. Lembaga Sertifikasi tersebut telah mendapatkan akreditasi dari pengembang sertifikasi. Artinya Lembaga Sertifikasi tersebut telah memiliki kompetensi yang tepat untuk melakukan sertifikasi pengelolaan hutan lestari menggunakan sistem sertifikasi dari pengembang sertifikasi. Lembaga sertifikasi yang ada di Indonesia ada dua yaitu Lembaga Sertifikasi LEI dan FSC. Lembaga Sertifikasi LEI yang telah mendapatkan akreditasi dari LEI adalah PT. TUV Rheinland Indonesia, PT. Superintending Company of Indonesia (SUCOFINDO), PT. Mutuagung Lestari dan PT. SGS Indonesia. Lembaga Sertifikasi FSC yang berperasi di Indonesia SGS, DNV Business Assurance, Scientific Certification System (SCS), Control Union Certification BV (CU) dan GFA certification GmbH . (www.lei.or.id)

92 LEI adalah lembaga akraditani

LEI adalah lembaga akreditasi yang bertugas mengembangkan sistem dan prosedur sertifikasi , melaksanakan dan monitoring dan pelatihan untuk mendukung proses sertifikasi yang kredibel. Visi LEI adalah menjadi organisasi yang memperjuangkan terselenggaranya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan melalui sistem sertifikasi dan ekolabel yang kredibel. . (www.lei.or.id)

93 FSC adalah organisasi independen, non pemerintah, non profit yang bertujuan untuk mempromosikan pengelolaan hutan

di dunia. FSC didirikan pada tahun 1993 sebagai bentuk respon terhadap deforestasi dan degradasi hutan di dunia baik di negara-negara maju maupun di negara-negara berkembang serta adanya ketidakpuasan terhadap upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam merespon dan menanggulangi fenomena deforestasi dan degradasi hutan di dunia. FSC adalah salah satu pengembang sertifikasi hutan di tingkat internasional. (www.lei.or.id)

www.lei.or.id

yang dibebani hak milik. Hutan rakyat menurut Awang<sup>95</sup> adalah pengelolan hutan yang berasal dari inisiatif masyarakat maupun dari pemerintah yang bertujuan untuk memberikan jaminan kelestarian bagi peningkatan kualitas antar generasi secara berkelanjutan.

Adanya sertifikasi hutan rakyat, maka pengelolaan hutan rakyat di Indonesia memerlukan adanya strategi baru. Hal ini disebabkan karena karakteristik pengelolaan hutan rakyat yang bersifat individual,dikelola oleh keluarga, tidak memiliki menejemen formal dan cenderung subsisten 66. Kondisi ini menjadikan keberadaan hutan rakyat tidak mempunyai daya tawar yang tinggi terhadap pedagang dan industri terjaminnya keberlanjutan hutan rakyat<sup>97</sup>.

Tuntutan sertifikasi hutan rakyat menjadi tantangan tersendiri bagi pengelolalan hutan rakyat di Indonesia. Sertifikat dan legalitas bagi hutan rakyat menjadi syarat mutlak agar bisa diterima, diakui dan laku di pasar internasional. Keberadaan hutan rakyat dalam konteks ini dimaknai telah terintegrasi dalam perdagangan internasional.

Salah satu hutan rakyat yang telah mendapatkan sertifikasi di Indonesia adalah hutan rakyat di Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta. Keberadaan hutan rakyat ini telah mendapatkan sertifikat PHBML98 skema LEI oleh Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Group<sup>99</sup> pada tanggal 20 September 2006. Sertifikat tersebut diberikan melalui Koperasi Wana Manunggal Mandiri Kabupaten Gunungkidul<sup>100</sup>. Wilayah kelola yang tersertifikasi seluas luas 815,18 ha dengan jumlah petani yang terlibat sebagai pengelola sebanyak 997 keluarga. Wilayah kelola hutan rakyat yang tersertifikasi berada di tiga daerah kelola yaitu di Desa Girisekar Kecamatan Panggang, Desa Dengok, Kecamatan Playen dan Dusun Kedungkeris, Kecamatan Nglipar<sup>101</sup>. Sertifikasi hutan rakyat di Kabupaten Gunungkidul tidak bisa dilepaskan dari intervensi para aktor lain seperti NGO (,AR<sup>u</sup>PA<sup>102</sup> dan Yayasan Shorea Yogyakarta<sup>103</sup> dan PKHR<sup>104</sup>), Funding/donor (LEI), Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, pengusaha kayu dan pasar.

Tulisan ini hanya akan memfokuskan pada peran NGO ARUPA dalam sertifikasi hutan rakyat di Desa Girisekar Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul. NGO ARUPA yang berkedudukan di Yogyakarta merupakan salah satu NGO di Indonesia yang terlibat sejak awal penyusunan dokumen sertifikasi PHBML LEI pada tahun 2003. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran NGO ARUPA dalam sertifikasi hutan rakyat di Desa Girisekar Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul.

<sup>95</sup> San Afri Awang. Gurat Hutan Rakyat di Kapur Selatan (Yogyakarta: Debut Press, 2009) hlm 7-8

<sup>&</sup>lt;sup>96</sup> Subsisten artinya pemenuhan kebutuhan hidup yang paling minimalis.

<sup>97</sup> San Afri Awang, Peran Para Pihak Dalam melestarikan Hutan Rakyat (Spesial Kasus Gunungkidul), (makalah dalam lokakarya Gunung Kidul, 2006.) hlm 1

<sup>98</sup> Sertifikat PHBML diatur dalam Pedoman LEI seri 99-40 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Sertifikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBML). Sertifikasi PHBML yang dikembangkan oleh LEI bertujuan untuk kepentingan pasar dan sebagai salah satu alat rekognisi terhadap berbagai model Pengeloaan Hutan berbasis Masyarakat (PHBML) . (www.lei.or.id)

PT Thuy Rheiland Group adalah salah satu lembaga sertifikasi yang telah mendapatkan akreditasi dari LEI .

<sup>(</sup>www.lei.or.id)

100 Koperasi Wana Manunggal Lestari adalah wadah bagi para petani hutan rakyat yang berada di tiga unit manajemen pengelolaan hutan rakyat di Kabupaten Gunungkidul yang tersebar di Desa Girisekar Kecamatan Panggang, Desa Dengok Kecamatan Playen dan Desa Kedungkeris di Kecamatan Nglipar.

Data Base AR<sup>u</sup>PA, 2006 102 AR<sup>U</sup>PA singkatan dari Aliansi Relawan untuk Penyelamatan Alam. ARuPA adalah salah satu NGO yang ada di Yogyakarta yang mempunyai konsent pada isu lingkungan hidup terutama isu hutan. ARuPA bekerja sama dengan PKHR UGM dan Yayasan Shorea turut serta memfasilitasi gerakan sertifikasi hutan rakyat di Gunungkidul

<sup>103</sup> Yayasan Shorea singkatan dari Small Home of Rural Empowerment Activists dalah salah satu NGO yang ada di Yogyakarta yang mempunyai konsen pada isu lingkungan hidup terutama isu hutan. Yayasan Shorea bekerja sama dengan PKHR UGM dan ARuPA turut serta memfasilitasi gerakan sertifikasi hutan rakyat di Gunungkidul

<sup>104</sup> PKHR singkatan dari Pusat Kajian Hutan Rakyat. Pusat studi ini berkedudukan di Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta. PKHR UGM bersama dengan ARUPA dan Yayasan Shorea turut serta memfasilitasi gerakan sertifikasi hutan rakyat di Gunungkidul

#### 2.TINJAUAN PUSTAKA

Studi terkait dengan sertifikasi hutan sudah ada yang melakukan. Beberapa studi yang relevan dalam studi ini sebagai berikut: Dominique Irvine<sup>105</sup>, Alexander Hinrichs dkk<sup>106</sup>, Ronald Muh Ferdaus<sup>107</sup>

Studi yang dilakukan oleh Dominuque Irvine bertujuan untuk menjelaskan sejarah, manfaat, persoalan dan tantangan yang ada dalam sertifikasi hutan. Studi ini menjelaskan sejarah keterlibatan masyarakat dalam sertifikasi hutan serta tantangan dan peluang terkait dengan sertifikasi hutan. Hasil studi ini menunjukkan bahwa:

- a. Sertifikasi saat ini berfokus pada hutan kemasyarakatan yang memproduksi kayu dan secara umum disupport oleh NGO, pemerintah dan organsiasi antar negara.
- b. Sertifikasi dibentuk untuk mengintegrasikan masyarakat dengan pasar kayu internasional, menciptakan struktur pasar regional yang lebih tinggi serta meningkatkan jaringan yang lebih dekat dengan industri.
- c. Hutan kemasyarakatan memfokuskan pada masalah kayu dengan sesuai dengan pengalaman dan kapasitas masyarakat dalam mengelola hutan.
- d. Produksi kayu telah menyediakan keuntungan ekonomi yang signifikan tapi bagi masyarakat sulit untuk mendapatkan akses pasar tersebut.
- e. Pasar sertifikasi dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam sertifikasi di negarangara yang berbeda
- f. Sertifikasi dapat menciptakan forum untuk partisipasi lokal yang mempengaruhi aktifitas industri dan berdampak bagi masyarakat dan hutannya.

Studi ini lebih banyak menyoroti persoalan sejarah, manfaat dan tantangan dalam sertifikasi hutan rakyat di beberapa negara seperti Bolivia, Canada, Swedia, Amerika Utara. Studi ini analisisnya merupakan kajian ekonomi politik akan tetapi dalam studi ini tidak dijelaskan pendekatan ekonomi politik yang digunakan. Studi ini lebih banyak menyoroti model-model sertifikasi untuk hutan rakyat, dampak industri dari sertifikasi hutan rakyat serta persoalan partisipasi sosial dari para aktor dalam sertifikasi hutan rakyat.

Studi yang dilakukan oleh Alexander Hinrich dkk bertujuan untuk memahami keadaan, proses-proses dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh sertifikasi hutan rakyat di Indonesia. Studi ini dianalisis berdasarkan literatur, diskusi dengan para pakar dan kunjungan-kunjungan ke wilayah-wilayah yang telah mendapatkan sertifikat yang terletak di Jawa Tengah (Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri), Daerah Istimewa Yogyakarta (Kabupaten Gunungkidul ) dan Sulawesi Tenggara (Kabupaten Konawe Selatan). Hasil studi menunjukkan bahwa:

- a. Semua hutan rakyat yang saat ini disertifikasi mencakup suatu campuran dari hutan tanaman keras (jati) dan wanatani (*agroforestry*).
- b. Semua wilayah yang disertifikasi didukung oleh organisasi-organisasi eksternal melalui keterlibatan donor dan promotor (LSM, peneliti, prakarsa sektro swasta ) dan melibatkan para tokoh kepala desa, kepala dusun dan ketua Rukun Tetanggga.
- c. Pengembangan kapasitas terbukti relevan untuk aspek-aspek tehnis seperti inventori hutan, pengembangan organisasi, penggunaan komputer dan sebagainya.
- d. Akses pasar dan skala ekonomi terbukti sangat penting dalam sertifikasi hutan rakyat.

-

<sup>&</sup>lt;sup>105</sup> Dominuque Irvine. Certification and Community Forestry: Current Trends, Challenges and Potential (Washington DC, 1999).

<sup>106,</sup> Alexander Hinrichs dkk,. Sertifikasi Hutan Rakyat di Indonesia. (Deutsch Geselschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, 2008)

<sup>&</sup>lt;sup>107</sup> Ronald Muh Ferdaus. *Community Forest Certification in Gunungkidul District*, (Paper ,2008)

e. Pengenalan sertifikasi oleh para pendukung yang menjanjikan insentif pasar untuk sertifikasi menjadi alasan utama bagi masyarakat untuk terlibat dalam semua aspek sertifikasi.

Studi ini lebih banyak mengkaji persoalan-persoalan sertifikasi dari sisi menejerial dan teknis yang dihadapi oleh petani hutan rakyat di Kabupaten Gunungkidul.

Studi yang dilakukan oleh Ronald M Ferdaus memfokuskan pada sertifikasi hutan rakyat yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa inisiatif proses sertifikasi dilakukan oleh banyak pihak seperti NGO dan funding. Keberadaan NGO dan *Funding* didukung oleh pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul. Tantangan dalam sertifikasi hutan rakyat di Kabupaten Gunungkidul terkait dengan aspek kelembagaan hutan rakyat yang belum kuat dan persoalan pasar. Studi ini mempunyai korelasi dengan penelitian yang penulis lakukan. Akan tetapi studi ini lebih menyoroti proses sertifikasi hutan rakyat di Kabupaten Gunungkidul secara umum dan dianalisis secara deskriptif. Studi yang dilakukan oleh penulis terfokus pada peran NGO ARUPA dalam sertifikasi hutan rakyat .

Berdasarkan studi – studi yang telah penulis paparkan di atas penulis bermaksud mengkritik dan melengkapi kajian sertifikasi hutan rakyat di Kabupaten Gunungkidul. Kajian terdahulu memang sudah menyinggung berbagai persoalan terkait dengan sertifikasi hutan seperti nilai ekonomi sertifikasi hutan, peran NGO dalam sertifikasi, akar,isu, proses dan tantangan, keterlibatan masyarakat,implementasi kebijakan. Kajian terdahulu ada juga yang mengkaji persoalan menejerial, persoalan teknis terkait dengan sertifikasi hutan rakyat namun tidak dikaji peran NGO ARUPA secara detail dalam sertifikasi hutan rakyat di Desa Giresekar Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul. Teori yang digunakan dalam studi ini menggunakan teori perubahan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualittaif.

#### Landasan teori

Studi ini menggunakan teori perubahan sosial dalam analisisnya. Perubahan sosial (*social change* ) menurut Laur dalam Agus Salim <sup>108</sup> disebutkan sebagai berikut:

"variations over time in the relationships among individuals, groups, cultures and societies. Social change is pervasive: all of social life is continuallay changing". Perubahan sosial biasanya terjadi secara wajar (natural), gradual, bertahap dan serta tidak pernah terjadi secara radikal atau revolusioner <sup>109</sup>. Agus Salim<sup>110</sup> menjelaskan sebagai berikut:

" proses perubahan sosial meliputi proses reproduksi dan proses transformasi. Proses reproduksi adalah proses mengulang-ulang, menghasilkan kembali segala hal yang diterima sebagai warisan budaya dari nenek moyang kita sebelumnya. Proses transformasi adalah proses penciptaan hal yang baru (*something new*) yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi (*tools and technologies*) "

Teori perubahan sosial dalam konteks ini lebih banyak memfokuskan tentang peran NGO ARUPA dalam mendorong perubahan sosial yang ada di Desa Gisekar Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul. Peran NGO ARUPA dalam mendorong perubahan sosial ini difokuskan pada aspek kelembagaan masyarakat di Desa Girsekar Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul terkait adanya sertifikasi hutan rakyat.

110 *Ibid* hlm 20

<sup>&</sup>lt;sup>108</sup> Agus Salim, *Perubahan Sosial : Sktesta Teori dan refleksi metodologi kasus Indonesia* (Yogyakarta, Tiara Wacana, 2002) hlm 1

<sup>&</sup>lt;sup>109</sup> *Ibid*. hlm 20

Menurut Rahardjo <sup>111</sup> secara ringkas lembaga sosial *(social institution)* dapat diartikan sebagai kompleks norma atau kebiasaan-kebiasaan untuk mempertahankan nilai-nilai yang dipandang sangat penting dalam kultur dan struktur. Di dalam suatu lembaga, setiap orang yang termasuk di dalamnya pasti memiliki status dan peran tertentu. Status merupakan refleksi dari struktur sedangka peran merupakan refleksi dari kultur.

Keberadaan lembaga merupakan fenomena yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini karena selain mengingat fungsinya yang urgent yaitu untuk menjaga dan mempertahankan nilai-nilai yang tinggi dalam masyarakat juga terkait dengan pencapaian berbagai macam kebutuhan manusia. Dalam konteks ini, keberadaan kelembagaan lokal dalam sertifikasi hutan rakyat menjadi sebuah keniscayaan untuk mendorong proses perubahan sosial yang terjadi di Desa Girsekar Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul. Atau dengan kata lain kelembagaan lokal menjadi *tool* atau *media* yang *urgent* dalam sertifikasi hutan rakyat. Representasi dari kelembagaan lokal dalam hutan rakyat di Desa Girsekar Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul adalah seperti adanya Paguyupan Kelompok Tani Sekar Pijer.

#### 3.METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena metode ini menekankan pada sifat realita yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dengan subyek yang diteliti dan tekanan situasi yang membentuk penyelidikan. Penyelidikan yang dilakukan bersifat sarat nilai. Strategi penelitian ini menggunakan strategi penelitian interpretatif (*interpretative research*).

Lokasi penelitian berada di Desa Girisekar Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta. Hal ini disebabkan karena Desa ini merupakan salah satu desa yang mempunyai potensi hutan rakyat dan merupakan salah satu desa yang merupakan kawasan unit menejemen hutan rakyat yang mendapatkan sertifikasi pengelolaan hutan rakyat.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah seluruh anggota Kelompok Tani Hutan Rakyat yang ada di Desa Girisekar Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah Desa, NGO (AR<sup>u</sup>PA ).

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan secara bertujuan (*purposive sample*)<sup>113</sup> Informan dalam penelitian ini terdiri dari anggota dan pengurus Kelompok Petani Hutan Rakyat di Gunungkidul di Desa Girisekar Kecamatan Panggang, NGO AR<sup>u</sup>PA.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam (depth interview). Peneliti melakukan wawancara dengan tokoh-tokoh kunci (key informan) secara terstruktur dan terbuka yang relevan dalam penelitian ini terkait. Data sekunder meliputi kebijakan sertifikasi hutan, kebijakan sertifikasi hutan rakyat, laporan-laporan dan jurnal-jurnal , buku , makalah, proceeding terkait proses sertifikasi hutan rakyat serta dokumentasi tentang sertifikasi hutan rakyat.

Proses analisis data merupakan proses yang saling terkait yaitu reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan/verifikasi. Proses ini dilakukan sebelum tahap pengumpulan data, proses pengumpulan data dan setelah tahap pengumpulan data<sup>114</sup>.

\_

<sup>111</sup> Rahardjo, Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian (Yogyakarta :Gadjah Mada University Press 1999) hlm 157

<sup>&</sup>lt;sup>112</sup> Norman K Denzin, and Yvonna S Lincoln. *Hand book of Qualittaive Research* (California: Sage Publication , 2009) hlm 6

<sup>&</sup>lt;sup>113</sup> *ibid*. hlm 255

<sup>&</sup>lt;sup>114</sup> A Michael Huberman dan Mattew B Miles dalam Denzin dan Lincoln, 2009: 594

#### 5. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setting Sosial, Ekonomi dan Budaya Masyarakat Desa Girisekar Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul

Desa Girisekar merupakan salah satu desa di Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa ini terbagi dalam 9 dusun, yaitu Krambil, Warak, Sawah, Bali, Mendak, Belimbing, Waru, Pijinan, dan Jeruken. Desa Girisekar merupakan daerah dengan topografi berbukit-bukit dan berkelok-kelok dengan ketinggian tanah 400 M di atas permukaan laut. Masyarakat di Desa Girsekar memanfaatkan air tanah hujan untuk persediaan jika musim kemarau tiba. Secara Geografis, Desa Girisekar terletak 6,5 Km dari kecamatan Panggang 29 Km dari Kabupaten Gunungkidul dan 35 Km dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta<sup>115</sup>

Desa Girisekar memiliki luas 2.115,0 ha dengan pola pemanfaatan sebagai berikut : Hutan (Negara) luasnya 433,41 Ha, Bangunan luasnya 120,49 Ha, Tegal (Tanah kering) luasnya 1446,62 Ha dan lain-lain seluas 114,48<sup>116</sup> Pemanfaatan lahan di Desa Girisekar terbesar untuk tanah kering (tegal). Jumlah penduduk Desa Girisekar pada tahun 2012 ada 8.676 orang yang tersebar di Dusun Krambil, Dusun Warak, Dusun Sawah, Dusun Waru, Dusun Blimbing, Duusn Bali, Dusun Mendak , Dusun Pijenan dan Dusun Jeruken<sup>117</sup>.

Kondisi alam Girisekar kurang kondusif bagi pengembangan pertanian persawahan. Hal ini menyebabkan masyarakat mengembangkan pola-pola pertanian lahan kering. Model penanaman ini dikenal dengan istilah sistem campursari (agroforestry). Adanya model agroforestry yang dimiliki oleh masyarakat Desa Girisekar mencerminkan pengetahuan lokal (local knowledge) masyarakat. Masyarakat juga mempunyai pengetahuan untuk membuat kalender musim/kalender tanam. Kalender musim yang diterapkan oleh masyarakat desa Girisekar sebagai berikut: musim tanam pertama kali dilakukan pada bulan Oktober . Kegiatan pemupukan dilakukan pada bulan November, Desember. Pemanenan dilakukan pada bulan Januari dan Februari 118. Berdasarkan hal tersbut dapat dinterpretasikan bahwa masyarakat dengan kearifan lokalnya bisa merespon kondisi alam yang tidak kondusif bagi pengembangan pertanian. Adanya local knowledge yang dimiliki oleh masyarakat Desa Girisekar ini menjadi salah satu potensi atau modal sosial bagi masyarakat.

Masyarakat Desa Girisekar mencukupi kebutuhannya melalui sektor pertanian, peternakan dan non pertanian. Sektor pertanian yang ada merupakan model pertanian campuran (*model agroforetsry*). Masyarakat yang bergerak di sektor pertanian mayoritas usia 40 tahun ke atas. Hal ini disebabkan karena usia muda produktif tidak tertarik dalam sektor pertanian. Profesi sebagai petani itu tidak menjadi impian para pemuda di Desa Girisekar<sup>119</sup>. Sektor peternakan menjadi salah satu sektor utama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Girisekar. Sektor peternakan yang meliputi ternak sapi, kambing, domba dan ayam . Adanya profesi ini menuntut ketersediaan terhadap kebutuhan makanan ternak mereka. Kebutuhan tersebut bisa dipenuhi dari lahan yang mereka kelola dengan model *agro forestry*. Namun kadang hijauan tanaman ternak tidak

<sup>&</sup>lt;sup>115</sup> Data Monografi Desa Girisekar 2012

<sup>116</sup> ibid

<sup>117</sup> ibid

<sup>&</sup>lt;sup>118</sup> Data base ARUPA 2006 dan Wawancara dengan SDY, 6 Januari 2012

<sup>&</sup>lt;sup>119</sup> Para pemuda merasa gengsi untuk menjadi petani. Mereka memilih merantau ke luar desa. Mereka bekerja di sektor non pertanian seperti menjadi buruh bangunan, tukang kayu, tukang batu dan sebagianya.

bisa memenuhi kebutuhan ternak mereka. Mereka harus membeli makanan ternak mereka. Misal untuk ternak sapi perlu membeli *dedak*<sup>120</sup> dan jerami<sup>121</sup>.

Masyarakat Desa Girisekar mempunyai tradisi menyumbang bagi warga desa yang mempunyai hajatan, baik hajatan pernikahan, kelahiran, khitanan dan kematian. Tradisi ini ada sejak turun temurun. Tradisi ini berbengaruh terhadap pola konsumsi mereka. Biasanya dalam musim hajatan, biaya sosial yang dikeluarkan oleh masyarakat akan menjadi lebih banyak dibandingkan dengan pengeluaran lainnya<sup>122</sup>.

#### Pengelolaan hutan rakyat di Desa Girisekar

Pengelolaan Hutan rakyat di desa Girisekar mulai berkembang pada tahun 60 atau 70-an. Keberlanjutan hutan rakyat hingga saat ini sebabkan oleh beberapa faktor , faktor ekonomi, faktor dukungan kebijakan publik , faktor budaya dan rehabilitasi lahan. Beberapa faktor tersebut jika ringkas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Faktor penyebab kebelangsungan hutan rakyat di Desa Girisekar<sup>123</sup>

Faktor	Penjelasan		
Faktor ekonomi	Faktor ekonomi terkait dengan kondisi lahan pertanian di		
	Desa Girisekar yang sangat tandus. Tanaman pertanian		
	yang bisa tumbuh hanya tanaman singkong. Kondisi ini		
	mendorong masyarakat di Girisekar menanam tanaman		
	keras (jangka panjang ) yang bernilai ekonomis, seperti		
	jati, mahoni, akasia.		
2. Faktor dukungan	Faktor dukungan kebijakan meliputi dukungan dari bupati		
kebijakan publik	Gunungkidul pada masa itu (Darmakum Darmo Kusumo )		
	yang mengininsiasikan program reboisasi . Bupati		
	Gunungkidul pada masa itu memberikan bantuan bibit jati		
	kepada masyarakat agar ditanam di lahan miliknya.		
3. Faktor budaya	Faktor budaya terkait dengan harga kayu jati yang menjadi		
	komoditas mahal bagi masyarakat. Masyarakat Girisekar		
	menanam kayu jati untuk memenuhi kebutuhan peralatan		
	rumah tangga		
4. Faktor Rehabilitasi	Faktor rehabilitasi lahan. Faktor rehabilitasi lahan terkait		
lahan	dengan topografi tanah yang tidak kondusif bagi lahan		
	pertanian.		

Dinamika pengelolaan hutan rakyat di Desa Girisekar diawali pada tahun 1963 di mana lahan masyarakat Girisekar tidak ada tanaman jati. Hal ini disebabkan karena tanaman jati hanya ada di kawasan hutan negara. Pada tahun tersebut ada pembukaan hutan negara yang dilanjutkan dengan penanaman. Ada masyarakat yang sudah mulai menanam tanaman jati di lahan miliknya meskipun model pengelolaan hutan rakyat yang ada masih sederhana, tidak ada model tanam. Pada tahu 1970-an, hutan rakyat menjadi salah satu program pembangunan di Kabupaten Gunungkidul. Bupati Gunungkidul, Darmakum Darmo Kusumo mencanangkan reboisasi jati di Kabupaten Gunungkidul dengan pilot project di Dusun Mendak , Desa Girisekar. Pada tahun 1987, masyarakat merasa keuntungan secara ekonomi dari penanaman kayu jati. Hutan rakyat berkembang secara pesat. Pada tahun 1987, masyarakat mulai mengenal sistem pola tanam modern. Pada tahun 2002, hutan rakyat berkembang secara pesat sementara hutan negara banyak

\_

<sup>&</sup>lt;sup>120</sup> Dedak: sisa penggilingan gabah kering yang menjadi bahan pakan ternak

<sup>121</sup> Wawancara dengan SDY, 6 Januari 2012)

<sup>122</sup> ibid

<sup>&</sup>lt;sup>123</sup> Data base AR<sup>u</sup>PA, 2006

yang gundul. Adanya kondisi degradasi hutan di lahan hutan negara kemudian ada program GNRHL (penanaman jati di lahan hutan negara)<sup>124</sup>.

Pengelolan hutan rakyat di Girisekar ditandai dengan belum adanya kelembagaan hutan rakyat yang secara serius memberikan perhatian kepada keberadaan hutan rakyat. Kelembagaan yang ada di Desa Girisekar adalah kelompok tani untuk kegiatan on farming (pertanian) 125. Kondisi ini tentu saja berpengaruh terhadap pengelolaan hutan rakyat yang ada. Secara institusional, para petani hutan rakyat tidak mempunyai wadah untuk meningkatkan posisi tawar kepada berbagai pihak. Teknis pengelolaan hutan rakyatpun lebih mendasarkan pada pengetahuan lokal masyarakat yang sudah berlangsung secara turun temurun <sup>126</sup>. Tanaman jati menjadi tanaman dominan Tradisi ini sebenarnya bisa dikatakan sebagai bagian dari local wisdom yang dimiliki oleh masyarakat di Desa Girisekar.

Mekanisme pengaturan hasil dalam pengelolaan hutan rakyat di Girisekar lebih banyak dilakukan dengan mendayagunakan sumber daya di tingkat keluarga<sup>127</sup>. Keberadaan hutan rakyat belum bisa optimal dalam perolehan hasil panennya. Hasil panen dari pengelolaan hutan rakyat di Desa Girisekar lebih banyak untuk pemenuhan kebutuhan sendiri (bangunan, kayu bakar dan sebagainya). Para petani hutan rakyat belum mempunyai gagasan yang berorientasi pada profit dan profesionalitas. Adanya mindset seperti ini menimbulkan fenomena tebang butuh<sup>128</sup>. Meskipun demikian para petani di Desa Girisekar ternyata juga melakukan tebang pantas. Penebangan pohon juga berdasar pada ukuran diameter pohon yaitu pohon-pohon yang telah berumur di atas 15 tahun dengan keliling diatas 60 cm. Ini artinya, masyarakat sebenarnya mempunyai consiousness of future security bagi anak cucunya.

Mekanisme jalur perdagangan kayu hutan rakyat di Desa Girisekar dilakukan melalui jalur atau mata rantai yang sederhana. Ada dua jalur perdagangan kayu produk hutan rakyat di Desa Girisekar yaitu jalur penjualan kayu di di dalam desa dan keluar desa. Penjualan kayu di dalam desa langsung melibatkan petani, pengepul dan pedagang. Penjualan kayu di luar desa melibatkan banyak pelaku<sup>129</sup>.

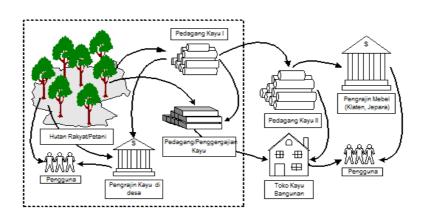
- 1.Kayu dari hutan rakyat/petani terdistribusi di dalam desa dan keluar desa. Distribusi di dalam desa terbagi melalui dua jalur vaitu (1) dari petani langsung ke pemakai atau pengrajin, dan (2) dari petani dibeli oleh penebas (pengumpul kayu) kemudian dibeli oleh pengrajin atau pedagang/penggergajian.
- 2. jalur pemasaran ke keluar desa melibatkan banyak pelaku. Baik jalur ke luar desa maupun di dalam desa yang tidak langsung ke pemakai selalu melalui penebas. Penebas adalah orang-orang yang berasal dari dalam desa yang umumnya adalah pemilik modal dan hampir selalu ada di setiap dusun. Penebas ini melakukan usahanya hanya berdasar pesanan dan hanya beberapa penebas saja yang bekerja secara rutin, tidak tergantung pesanan.

<sup>124</sup> ibid

<sup>125</sup> ibid

<sup>126</sup> Para petani hutan rakyat banyak menanam tanaman kehutanan seperti jati lokal, mahoni dan akasia. Bibit tanaman jati awalnya diperoleh dari hutan yang dikelola oleh dinas kehutanan Kabupaten Gunungkidul. Setelah tanaman tumbuh besar dan mampu menghasilkan biji, tanaman jati didapat dengan cara memindahkan semai (tukulan) yang banyak tumbuh di tegal mereka. Para petani yang tidak memiliki lahan luas biasanya menanam jati secara acak tanpa mengenal jarak tanam. Hal ini berbeda dengan para petani yang memilik lahan luas, mereka sudah menerapkan model tanam secara modern (mengenal jarak tanam). Tanaman jati banyak ditanam di lereng-lereng bukit dan bagian tepi lahan garapan (galeng/teras). Jika ada biji jati tumbuh ditengah-tengah bidang olah, biasanya akan dipindah ke tempat yang sekiranya tidak mengganggu tanaman pertanian. *ibid*<sup>127</sup> *ibid* 

<sup>128</sup> Tebang butuh artinya menebang pohon jati sesuai dengan tingkat kebutuhan suatu keluarga misalnya: ketika punya hajat, ada keluarga yang sakit, biaya sekolah, membangun atau memperbaiki rumah dsb



Gambar 1.. Jalur Perdagangan Kayu Hutan Rakyat Girisekar

Mekanisme jalur perdagangan kayu yang sederhana di Desa Girsekar merupakan pengetahuan lokal yang dimiliki oleh masyarakat secara turun temurun. Adanya mekanisme perdagangan ini telah berkontribusi bagi kelangsungan hidup masyarakat Desa Girisekar. Hasil penjualan dari produk hutan yang dikelola oleh masyarakat bisa menjadi katup penyelamat bagi masyarakat selama ini.

# Peran NGO ARUPA dalam Sertifikasi Hutan Rakyat di Desa Girisekar Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul

Proses sertifikasi hutan rakyat di Desa Girisekar Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul diawali dengan berbagai tahapan seperti: tahapan prakondisi, pengajuan sertifikasi serta pelaksanaan sertifikasi hutan rakyat.Prakondisi sertifikasi hutan rakyat di Desa Girisekar dilakukan oleh AR<sup>u</sup>PA melalui tahapan observasi<sup>130</sup>, assesment<sup>131</sup> dan pendampingan<sup>132</sup> serta persiapan sertifikasi. Prakondisi ini menjadi bagian penting dari kegiatan yang dilakukan oleh ARUPA<sup>133</sup>. Kegiatan pendampingan dalam rangka persiapan sertifikasi hutan rakyat di Kabupaten Gunungkidul oleh ARUPA sebagai berikut:

 Bentuk kegiatan transek meliputi kegiatan menemukenali potensi masyarakat di Desa Girisekar baik potensi sosial, ekonomi, budaya dan sebagainya. Pemetaan partisipatif dilakukan dalam rangka menentukan batasan lahan garapan yang

<sup>&</sup>lt;sup>130</sup> Kegiatan obesrvasi ini dilakukan oleh AR<sup>u</sup>PA pada tahun 2003. Observasi dimaksudkan untuk mengetahui potensi yang ada di masyarakat Desa Girisekar, baik potensi ekonomi, sosial, budaya juga potensi hutan rakyat .: Olah data dari Data base AR<sup>u</sup>PA , 2006 dan wawancara dengan para informan 2012.

<sup>&</sup>lt;sup>131</sup> Kegiatan ini dilakukan oleh AR<sup>u</sup>PA pada tahun 2004 untuk mengetahui potensi hutan rakyat dan potensi masyarakat Desa Giri Sekar. *Assesment* potensi hutan rakyat dilakukan dengan cara inventory hutan rakyat di Jeruken, Dusun Blimbing dan Dusun Pijenan. Assesment potensi masyarakat Desa Girisekar dilakukan dengan cara FGD.: Olah data dari Data base AR<sup>u</sup>PA, 2006 dan wawancara dengan para informan 2012.

<sup>&</sup>lt;sup>132</sup> AR<sup>u</sup>PA melakukan pendampingan di Desa Girisekar pada tahun 2004. Pada kegiatan pendampingan ini AR<sup>u</sup>PA melakukan beberapa kegiatan seperti : kegiatan transek, pemetaan partisipatif, penentuan unit manajemen rancang bangun dan peningkatan kapasitas. : Olah data dari Data base AR<sup>u</sup>PA, 2006 dan wawancara dengan para informan 2012

<sup>133</sup> Sumber: Olah data dari Data base AR<sup>u</sup>PA, 2006 dan wawancara dengan para informan 2012

dimiliki oleh petani hutan rakyat di Desa Girisekar. Selama ini masyarakat Desa Girisekar tidak pernah melakukan kegiatan ini. Batas antar lahan milik para petani hanya menggunakan *pathok*<sup>134</sup>.

Gambar 2. Pelaksanaan pemetaan partisipatif di Desa Girisekar <sup>135</sup>



 Kegiatan inventori dilakukan dengan maksud untuk menentukan potensi kayu hutan rakyat yang dimiliki oleh masyarakat Desa Girisekar. Kegiatan transek dan pemetaan partisipatif menjadi penting untuk penentuan rancang bangun unit menejemen.

Model pendampingan yang dilakukan oleh ARUPA dilakukan secara intens melakukan live in<sup>136</sup>, satu bulan menetap 21 hari. 1 minggu digunakan untuk *day off* <sup>137</sup> bagi staf yang bekerja di lapangan. Adanya model pendampingan seperti ini diharapakan para staf lapangan selain bisa berbaur dengan masyarakat juga bisa intens dalam melakukan kegiatan prakondisi menuju sertifikasis hutan di Desa Girisekar<sup>138</sup>.

Rangkaian kegiatan pendampingan ini dilakukan dengan pelibatan berbagai elemen yang ada di Desa Girisekar, seperti tokoh masyarakat, pemerintah dusun pemerintah desa, para petani baik laki-laki maupun para perempuan. Hal ini bertujuan agar proses mendorong pemberdayaan di tingkat masyarakat bisa berjalan secara komprehensif dan terintegrasi.

Pendampingan petani hutan rakyat di Desa Girsekar diawali dengan memperkuat unit menejemen Hutan Rakyat. Unit menejemen yang ada di Desa Girsekar adalah Kelompok Tani Sekar Pijer yang meliputi Dusun Pijenen , Jeruken dan Blimbing. Pembentukan kelompok dilakukan secara partisipatif. Paguyupan Kelompok Tani Sekar Pijer merupakan organisasi petani yang berkedudukan di Desa Girisekar, Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul. Anggota kelompok tani ini adalah para petani hutan rakyat yang ada di Desa Girisekar<sup>139</sup>.

Proses inisiasi kelompok ini diawali dengan membentuk team 9 yang merupakan perwakilan petani dari dua dusun yaitu dusun Dusun Pijenan dan Dusun Jeruken pada bulan Agustus 2004. Team 9 terdiri dari kepala dusun Pijenan dan Jeruken serta 3 tokoh masyarakat yang ada di dusun pijenan dan 3 tokoh dusun Jeruken. Team 9 ini kemudian

<sup>134</sup> Pembatas lahan yang terbuat dari semen

<sup>135</sup> Sumber : Data base AR<sup>u</sup>PA , 2006

<sup>136</sup> Menetap sementara waktu di suatu daerah karena projek

<sup>&</sup>lt;sup>137</sup> Day off artinya hari bebas tugas bagi staf lapangan di ARUPA

<sup>&</sup>lt;sup>138</sup> Wawancara dengan STY, 25 Mei 2012 dan 25 Juni 2012

<sup>139</sup> Wawancara dengan STY, 25 Mei 2012

berubah menjadi team kecil yang beranggotakan 12 orang pada bulan Maret 2005. Pada bulan Mei 2005 team kecil berubah menjadi tim inti dengan anggota 40 orang yang terdiri dari 20 orang dari Dusun Pijenan, 20 orang dari Dusun Jeruken. Jumlah anggota semakin bertambah menyebabkan tim inti membentuk kelompok tani tani Trubus pada tanggal 17 Oktober 2005 dan kelompok tani Subur pada tanggal 18 Oktober 2005<sup>140</sup>.

Koordinasi , monitoring dan evaluasi di tingkat KTH Subur dan KTH Trubus dilakukan per blok. Dusun Pijenan terdiri dari 11 blok dan Dusun Jeruken 13 blok. Adanya banyak kesamaan latar belakang sosial, ekonomi, budaya dan ditunjang letaknya yang saling berdekatan , maka KTH Subur dan KTH Trubus memutuskan bergabung dalam satu wadah Kelompok Tani Hutan Rakyat Pijer pada tanggal 05 Januari 2006 . KTH tersebut menjadi wadah petani di dua dusun yaitu dusun Jeruken dan dusun Pijenan. Adapun jumlah KTH Trubus 121 orang dan untuk KTH Subur 93 orang 141.



Gambar 3. KTH Pijer di Desa Girisekar 142

KTHR Pijer dalam perjalanannya berharap bahwa keberadaan kelompok ini tidak hanya menjadi wadah bagi dua dusun saja, tapi wadah bagi seluruh petani hutan rakyat di Desa Girisekar. Adanya harapan tersebut maka KTHR Pijer berubah namanya menjadi KTHR Sekar Pijer yang disahkan oleh perwakilan dari kecamatan dan kepala desa Giri Sekar pada tanggal 21 Januari 2006 . Pada tanggal 05 April 2006 Keanggotaan KTHR Sekar Pijer bertambah dengan bergabungnya KTHR Sekar Eko Jati dari Dusun Blimbing. Dinamika kelompok semakin dinamis apalagi dengan semakin tumbuhnya kesadaran untuk mewujudkan program sertifikasi hutan rakyat di desa Girisekar pasca adanya workshop sertifikasi hutan rakyat yang dilakukan oleh AR"PA pada tangal 17 Mei 2006. Kegiatan workshop tersebut dihadiri oleh seluruh kepala dusun di Desa Giri Sekar, tokoh masyarakat, aparat desa Girisekar. Pasca *workshop* sertifikasi tersebut, dibentuklah Paguyuban Kelompok Tani Sekar Pijer (PKTSP) di Desa Girisekar pada tanggal 22 Mei 2006. PKTSP ini menjadi wadah para petani hutan rakyat di Desa Girisekar . Penguatan kelembagaan lokal PKTSP ini juga ada AD/ART kelompok 143.

AR<sup>u</sup>PA melakukan kegiatan peningkatan kapasitas bagi unit menejemen. Upaya peningkatan kapasitas yang dilakukan seperti adanya pelatihan, workshop, studi banding, monitoring dan evaluasi dan sebagainya<sup>144</sup>.Kegiatan peningkatan kapasitas selain bertujuan untuk mempersiapkan pengajuan sertifikasi wilayah kelola di unit menejemen

142 Sumber: Data base ARuPA, 2006

<sup>140</sup> Data base AR<sup>u</sup>PA, 2006 dan wawancara informan 2012

<sup>141</sup> ibid

<sup>143 (</sup>Data base AR<sup>u</sup>PA, 2006 dan wawancara informan 2012).

<sup>144 (</sup>Sumber: Data base AR<sup>u</sup>PA, 2006 dan wawancara dengan informan (2012))

hutan rakyat di Desa Girisekar adalah untuk mendorong proses pemberdayaan bagi unit menejemen sebagai isntitusi lokal pengelola hutan rakyat di Desa Sekar.

Adanya kegiatan ini diharapkan akan *ada transfer of knowledge* kepada para petani sehingga diharapkan bisa melahirkan kesadaran kritis untuk melakukan penguatan kelembagan lokal .

Persiapan sertifikasi hutan rakyat mensyaratkan harus ada kelembagaan lokal yang kuat di Desa Girisekar. AR<sup>u</sup>PA telah memfasilitasi terbentuknya kelompok tani di Desa Girisekar. Nama kelompok tani tersebut adalah kelompok Tani Sekar Pijer. Adapun wilayah kelola yang diajukan untuk sertifikasi seluas 401,83 Ha yang meliputi Dusun Pijenan, Dusun Jeruken dan Dusun Blimbing.

Melalui berbagai tahapan ini, gagasan sertifikasi hutan rakyat tahap demi tahap bisa diterima oleh masyarakat. Masyarakat mulai mengetahui pentingnya sertifikasi hutan rakyat bagi kelestarian ekologi, ekonomi dan sosial. Adanya pendampingan yang dilakukan oleh AR<sup>u</sup>PA, masyarakat mempunyai banyak manfaat seperti adanya peningkatan kemampuan akan arti penting sertifikasi hutan rakyat, kemampuan melakukan pemetaan secara partisipatif dan meningkatkan kelembagaan lokal hutan rakyat yang ada di Desa Girisekar.

Peran yang dilakukan oleh NGO ARUPA telah mendorong pencapaian sertifikasi hutan rakyat di Kabupaten Gunungkidul. Sertifikasi hutan rakyat tersebut telah diberikan oleh PT Tuv Internasional kepada Koperasi Wana Manunggal Lestari pada bulan November 2006. Adanya sertifikasi terhadap pengelolan hutan rakyat di Desa Girsekar Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul yang mendasarkan skema sertifikasi LEI maka para petani hutan rakyat telah mendapatkan pengakuan dari pasar internasional atas pengelolaan hutan.

Keuntungan sertifikasi yang diperoleh para petani hutan rakyat di Desa Girsekar Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul lebih banyak keuntungan tidak langsung yang non monetary. Manfaat non monetary ini bisa dilihat dari aspek sosial , organisasi dan lingkungan. Keuntungan non monetary yang bersentuhan dengan aspek sosial dan organisasi meliputi :

- 1. adanya kelembagaan hutan rakyat baik di Desa Girsekar Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul. Kelembagaan kelompok tani hutan rakyat mempunyai aturan internal yang menjadi wajib ditaati oleh masing-masing anggotanya.
- adanya penguatan insititusi lokal hutan rakyat di Desa Girsekar Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul. Penguatan isntitusi lokal pengelola hutan rakyat di Kabupaten Gunungkidul salah satunya adalah adanya aturan internal dan adanya koordinasi kelompok serta adanya peningkatan kapasitas.
- 3. adanya *transfer of knowlege*. Manfaat lain dari adanya program sertifikasi hutan rakyat dalam spek sosial dan organsiasi adalah adanya *transfer of knowledge* dari NGO ARUPA kepada masyarakat Desa Girisekar terkait pentingnya sertifikasi, pentingnya kemampuan manajemen hutan rakyat, adanya skill pengolahan produk kayu tersertifikasi. Upaya peningkatan pengetahuan dan *skill* para petani hutan rakyat di Desa Girisekar Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul ini telah dilakukan oleh NGO ARUPA dengan memberikan berbagai pelatihan seperti pelatihan pemetaan, pelatihan inventarisasi potensi hutan rakyat, pelatihan pembuatan pupuk organik, pelatihan asesor dan sebagainya. Selain kegiatan pelatihan, ada juga kegiatan studi banding, workshop tentang sertifikasi hutan<sup>145</sup>.
- 4. Terminimalisirnya tebang butuh. Masyarakat menjadi tahu bahwa ketika melakukan penebangan pohon sesuai umurnya<sup>146</sup>.

-

<sup>145</sup> wawancara, infoman SRD 25 Juni 2012

<sup>146</sup> ibid

Berdasarkan apa yang telah dilakukan oleh NGO ARUPA, maka NGO ARUPA jika mengutip apa yang disampaikan oleh Setyarso<sup>147</sup> telah berperan dalam memberikan informasi terkait dengan kondisi dan kinerja unit menejemen yang dinilai, memantau proses dan sistem verifikasi serta mengajukan keberatan jika dimiliki bukti-bukti yang valid atas kekurangan yang melekat pada hasil verifikasi. Keberadaan NGO dalam sertifikasi hutan bisa meningkatkan tata kepemerintahan kehutanan (*good forestry governance*) secara umum, tata kepemerintahan usaha (*good corporate governance*) simultan menjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat (*sustainable livelihood*) di tingkat lokal.

Tabel 2. Posisi Organisasi Non pemerintah (NGO) dalam sertifikasi hutan 148

Sistem	Penyiapan	Diseminasi	Proses	Evaluasi	Penyempurnaa
	sistem		Implementasi	hasil	n sistem
Mandatory	Memelihara	Sosialisasi	Memberikan	Memberikan	Memberikan
	proses	dan	data/informasi	dukungan	masukan
	multipihak	diseminasi	yang valid,	atau	terhadap
		pada aktor	monitoring	keberatan	penyempurnaa
		lokal	proses	terhadap hasil	n sistem
Voluntary	Memelihara	Sosialisasi	Memberikan	Memberikan	Memberi
	proses	dan	data/informasi	dukungan	masukan pada
	multipihak	pemutakhiran	yang valid di	atau	kongres LEI
		persyaratan	dalam wadah	keberatan	
		sistem	FKD	terhadap hasil	

#### **5.PENUTUP**

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: NGO ARUPA telah berperan dalam proses sertifikasi hutan rakyat melalui berbagai tahapan yaitu tahap penyusunan dokumen PHBML, inisiasi gagasan sertifikasi hutan rakyat, prakondisi menuju sertifikasi serta proses sertifikasi hutan rakyat di Desa Girisekar Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul. Adanya peran yang sudah dilakukan oleh NGO ini telah berkontribusi dalam meningkatkan tata kepemerintahan kehutanan (good forestry governance), tata kepemerintahan usaha (good corporate governance) serta keberlanjutan kehidupan masyarakat (sustainable livelihood) di Desa Girisekar Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul.

#### 6.DAFTAR PUSTAKA

Awang, San Afri, 2001, Gurat Hutan Rakyat di Kapur Selatan, Debut Press, Yogyakarta
2002, Hutan Rakyat, Sosial Ekonomi dan Pemasaran, Yogyakarta, BPFE
UGM

Denzin, Norman K and Yvonna S Lincoln, 2009, Hand book of Qualittaive Research, California, Sage Publication

Hinrichs, Alexander dkk, 2008. Sertifikasi Hutan Rakyat di Indonesia, Deutsch Geselschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH

Maryudi, Ahmad, 2015. Rejim Politik Kehutanan Internasional. Yogyakarta, Gadjah Mada University

148 *ibid* hlm 11

<sup>&</sup>lt;sup>147</sup> *ibid*, hlm 11

- Meidinger Errol dkk,2002, Social and Political dimensions of Forest Certification, Germany
- Nusbaum, Ruth and Markku Simula, 2005, *The Forest Certification Handbook*. Earthscan , UK and USA
- Rahardjo, 1999. *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Per*tanian . Yogyakarta ,Gadjah Mada University Press
- Ritzer, George, 1992, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta, Rajawali Pers
- Salim, Agus .2002. Perubahan Sosial : Sktesta Teori dan refleksi metodologi kasus Indonesia Yogyakarta, Tiara Wacana.
- Simon, Hasanu, 2010. *Dinamika Hutan Rakyat di Indonesia*, Yogyakarta, pustaka Pelajar Suharjito, Didik, 2000, *Hutan Rakyat di Jawa : Perannya Dalam Perekonomian Desa*, Bogor, P3KM, Fakultas Kehutanan IPB.
- Turner, Jonathan H, *The Structure of Sociological Theory*, United State of America, Wadsworth Publishing Company
- Taridala, Yusran & Sarlan Adijaya, 2002, *Pranata Hutan Rakyat* Yogyakarta, Pustaka Hutan Kemasyarakatan
- Wiyono, Eko Budi, 2011. Pergeseran Hutan rakyat untuk pemenuhan subsistensi menuju Permintaan Pasar di Kabupaten Gunungkidul, Thesis Program Studi Sosiologi Pasca Sarjana FISIPOL UGM

#### Makalah, Buletin, majalah dan Proceeding

- Awang,San Afri,2006. *Peran Para Pihak Dalam melestarikan Hutan Rakyat (Spesial Kasus Gunungkidul )*,makalah dalam lokakarya Gunungkidul, 14 Februari Wonosari,
- Irvine ,Dominuque , 1999. Certification and Comunity Forestry: Current Trends, Challenges and Potential, Stanford University, Departement of Antropological Sciences
- Ferdaus, Ronald Muh. 2008. Community Forest Certification in Gunungkidul District, (Japan, Paper)
- Setyarso, Agus, 2009. Sertifikasi Hutan dan Peran Organisasi non pemerintah (Ornop.)

#### **Proceeding**

- Hindra, Billy, Potensi dan kelembagaan Hutan Rakyat, Proceeding seminar hasil Hutan ,2006
- Maryudi, Ahmad, 2005. Strategi sertifikasi pengelolaan hutan rakyat lestari, proceeding seminar nasional "Pengembangan Pengelolaan dan Pemanfaatan hasil Hutan Rakyat.

#### Dokumen

- Buku I, Buku II a, Buku II b Dokumen Pengajuan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari (PHBML) Unit Management Hutan Rakyat Desa Girisekar, Desa Dengok, Desa Kedungkeris, Kabupaten Gunungkidul. Dokumen ini menjadi bagian penting Dalam pengajuan sertifikasi oleh Koperasi Wana Manunggal Lestari Kabupaten Gunungkidul yang diajukan pada PT TUV International Indonesia, Jakarta, September 2006
- Info LEI,2002,Pilot project Sistem Sertifikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari dan Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari

Narative Report , Menuju Sertifikasi Hutan rakyat jati dan Pengembangan Akses pasar yang berkeadilan. Lokasi Desa Girisekar Kecamatan panggang kabupaten Gunungkidul Yogyakarta

Sistem Pengelolaan Hutan rakyat Lestari. Koperasi Wana Manunggal Lestari, 2008 Data Base ARUPA, 2006